

**TINJAUAN YURIDIS CALON GUBERNUR BERSTATUS TERPIDANA  
PERCOBAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA  
(Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan Dalam  
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017)**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum  
pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar**

**OLEH:**

**MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN**

**NIM: 10500112037**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN  
NIM : 10500112037  
Tempat / Tgl lahir : Tawau, 28 Juni 1994  
Jurusan /Prodi /Konsentrasi : Ilmu Hukum  
Fakultas / Progam : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Teluk Bayur Dalam No. 19, Kel. Maccini  
Sombala, Kec. Tamalate. Makassar  
Judul : TINJAUAN YURIDIS CALON GUBERNUR  
BERSTATUS TERPIDANA PERCOBAAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA  
(Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai  
Terpidana Percobaan Dalam Pemilihan Kepala  
Daerah Tahun 2017)

Menyatakan dengan kesungguhan dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 7 April 2017  
Penyusun

**MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN**  
**NIM : 10500112037**

## LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH

### PERSETUJUAN PENGUJI/PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Mohd Hazrul Bin Sirajuddin, NIM: 10500112037, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul, **"Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana Percobaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017)"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 8 Maret 2017 M

10 Jumadil Akhir 1438 H

Munqasy I	: St. Nurjannah, S.H., M.H.
Munqasy II	: Azhar Sinilele, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing I	: Dr. Jumadi, S.H., M.H.
Pembimbing II	: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 19903 1 003

Disetujui oleh:  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Istiqamah, S.H., M.H.

NIP. 19680120 199303 2 001

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana Percobaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017)" yang disusun oleh Mohd Hazrul Bin Sirajuddin, NIM: 10500112037, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munakaasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 07 April 2017 bertepatan dengan 10 Rajab 1438 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 09 Januari 2018

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Rahman Syamsuddin., S.H., M.H.	(.....)
Penguji I	: St. Nurjannah, S.H., M.H.	(.....)
Penguji II	: Azhar Sinifefe, S.H., M.M., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Jumadi, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui oleh,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
IIN Alauddin Makassar,



Moh. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIM: 19821016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana Percobaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017)”** ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan pula kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku pimpinan tertinggi beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Bapak Dr. Jumadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing arah penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Istiqamah, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Ilmu Hukum.
7. Kanda Damang, S.H., M.H. yang telah memberikan saran dan nasehat dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Kawan-kawan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, khususnya Jurusan Ilmu Hukum dan terkhusus lagi untuk kawan-kawan Ilmu Hukum 1,2 Angkatan 2012.
9. Kawan-kawan seperjuangan Muhammad Yusuf Yuskar, Muhammad Lukman Azis, Rahmawati Idrus, Muliawansyah, Apriadi Pratama, Kalman, Sri Rahayu Kartika Syarif, Rahmat Nur, S.H., dan Ahmad Quraisy S.H., yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Kawan-kawan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tahun 2015 di Posko 4 Desa Bontobila, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa (Accunk, Emma, Ikka, Tina, Nurul, Ramlah dan Inna) serta Bapak dan Ibu Posko, Kak Debo dan Adek Dhani terima kasih atas kasih sayangnya semua selama KKN.
11. Penjual-penjual Buku Online melalui Media Sosial (Facebook) Sri Buku Hukum, Pelita Buku, Buku Hukum Mangkubumi, Dodik Irawan, Athifa Jaya, Lapak Buku Hukum, Buku Vide, Erna Davariz Law dan lainnya terima kasih berkat mereka dapat juga saya yang di Makassar ini, memiliki buku-buku

hukum lawas berkualitas yang susah didapatkan di Toko Buku di Kota Makassar ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penyusun, terkhusus pada kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Andi Sirajuddin dan Ibunda Hj. Itari dan juga kepada saudara kembar tercinta Fatmah dan Fatimah. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan serta doa restu yang tulus yang diberikan kepada penyusun.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penyusunan hukum ini. Semoga penyusunan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 7 April 2017

Penyusun

**MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN**

NIM : 10500112037



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. <i>Latar Belakang Masalah</i> .....	1
B. <i>Rumusan Masalah</i> .....	5
C. <i>Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus</i> .....	6
D. <i>Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu</i> .....	6
E. <i>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</i> .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>12</b>
A. <i>Beberapa Pengertian</i> .....	12
1. <i>Pemerintah Daerah dan Calon Kepala Daerah</i> .....	14
2. <i>Terpidana Percobaan</i> .....	18
3. <i>Ruang Lingkup Hak Politik Secara Konstitusional</i> .....	20
B. <i>Syarat -Syarat Calon Kepala Daerah</i> .....	24
1. <i>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.</i> ....	25
2. <i>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah</i>	



Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.....	27
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. ....	30
C. <i>Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemilihan</i> .....	32
1. Pengertian Sistem Pemilihan.....	33
2. Pembagian Jenis Pemilihan.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. <i>Jenis Penelitian</i> .....	39
B. <i>Metode Pendekatan</i> .....	40
C. <i>Jenis dan Sumber Bahan Hukum</i> .....	40
D. <i>Metode Pengumpulan Bahan Hukum</i> .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. <i>Ketentuan Hukum Persyaratan Calon Kepala Daerah Untuk Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan</i> .....	43
B. <i>Hak Politik Rusli Habibie Sebagai Calon Kepala Daerah Berstatus Terpidana Percobaan</i> .....	54
C. <i>Analisis Kasus</i> .....	72
<b>BAB V .....</b>	<b>76</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. <i>Kesimpulan</i> .....	76
B. <i>Saran</i> .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>

## ABSTRAK

**Nama : Mohd Hazrul Bin Sirajuddin**

**NIM : 10500112037**

**Judul : Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana Percobaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017)**

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan status terpidana percobaan Rusli Habibie sebagai calon Gubernur Provinsi Gorontalo yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017. Pokok masalah tersebut kemudian dibagi kedalam dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, Bagaimana ketentuan hukum persyaratan calon kepala daerah untuk Rusli Habibie sebagai terpidana percobaan? Kedua, Bagaimana hak politik Rusli Habibie sebagai calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: penelitian hukum normatif dan empiris. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 sedangkan sumber bahan hukum sekunder yaitu: buku, skripsi, dan jurnal. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Selanjutnya metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui penelitian pustaka (*library research*). Cara pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis kasus dan peraturan perundang-undangan, penyajian buku, jurnal dan skripsi, lalu penarikan kesimpulan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini menegaskan bahwa Rusli Habibie sebagai terpidana percobaan yang ikut dalam Pilkada Tahun 2017 ini tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat. Karena dasar hukum penetapan pencalonannya berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf (f) PKPU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah yang diloloskan sebagai calon kepala daerah dengan statusnya sebagai terpidana percobaan sedangkan ada aturan yang lebih tinggi yang mengatur dasar hukum bagi terpidana atau mantan terpidana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa dibatasi hanya bagi mantan terpidana yang telah secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang dapat dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan kepala daerah. Sebelumnya Rusli Habibie telah melakukan *judicial review* Pasal 7 ayat 2 huruf (g) tersebut ke Mahkamah Konstitusi, namun sampai saat ini perkara yang diajukan dengan Nomor Register Perkara 71/PUU-XIV/2016 belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Seharusnya perkara tersebut harus diputus sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2017 untuk menentukan legitimasinya sebagai calon pada saat pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Walaupun nanti, ketika telah

diputusnya perkara tentang pencalonan terpidana ini, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menerima atau menolak atau mungkin diputus secara konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat tetap tidak akan berpengaruh lagi bagi Rusli Habibie karena putusan tersebut tidak akan berlaku surut kebelakang, sesuai dengan asas hukum umum non-retroaktif.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak gelombang kedua tahun 2017<sup>1</sup> ini, meloloskan calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan. Melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 348/K/PID/2016 dengan terdakwa Rusli Habibie (Petahana<sup>2</sup> Provinsi Gorontalo) itu divonis satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun<sup>3</sup>. Sebelumnya, Rusli Habibie didakwakan melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP<sup>4</sup> kemudian Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan pidana 8 bulan penjara dan setelah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi dijatuhkan pidana yang

---

<sup>1</sup> Pemilihan Kepala Daerah serentak tahap kedua ini akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 dengan keikutsertaan 101 Daerah (terdiri dari 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota). (Diakses melalui website resmi KPU <https://pilkada2017.kpu.go.id>)

<sup>2</sup> Istilah “petahana” muncul di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf (r) dan Pasal 71, kemudian KPU memberikan pengertian tentang petahana sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Angka 19 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan “**Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.**” Selanjutnya Surat Edaran KPU Nomor 302/KPU/VI/2015 yang menjelaskan pengertian **petahana adalah Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran, mengundurkan diri sebelum masa jabatannya habis yang dilakukan sebelum pendaftaran, atau berhalangan tetap sebelum masa jabatannya habis sebelum masa pendaftaran.** Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, h.21-22. (Diakses melalui website resmi DPR RI [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id))

<sup>3</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 perihal pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 (Acara Pemeriksaan Pendahuluan I) h. 3. (Diakses melalui website resmi Mahkamah Konstitusi [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id))

<sup>4</sup> Pasal 317 ayat (1) KUHP berbunyi “*Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.

lebih ringan yaitu dengan 5 bulan penjara<sup>5</sup>. Berdasarkan putusan tersebut status Rusli Habibie sampai saat ini masih sebagai terpidana percobaan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang kemudian ikut serta dalam Pilkada tahun ini.

Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016<sup>6</sup> syarat-syarat calon kepala daerah diatur didalam Pasal 7 ayat 1 dan 2. Untuk syarat yang mengatur terkait status terpidana atau mantan terpidana diatur didalam Pasal 7 ayat 2 huruf (g) yang menyatakan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan yaitu *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf (g) tersebut menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik secara teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak”*. Dalam pasal *a quo*, jelas dan tegas menyatakan bahwa terpidana tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah, sedangkan untuk

---

<sup>5</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 perihal pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 (Acara Pemeriksaan Pendahuluan I) hal. 3 (Diakses melalui website resmi Mahkamah Konstitusi-[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id))

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

mantan terpidana harus telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan terpidana untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang 10 Tahun 2016 hasil revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ini kemudian disahkan oleh DPR dan Pemerintah ternyata peran DPR dan Pemerintah tidak hanya sebatas mengatur payung hukum pemilihan kepala daerah ini. Tetapi juga turut serta dalam penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan. Hal ini secara tertera didalam Pasal 9 huruf a yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU *“menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang bersifat mengikat”*. Melalui ketentuan ini jelas mengintervensi KPU yang merupakan Lembaga Negara yang independen dalam merumus aturan KPU berdasar Undang-Undang Pemilihan yang ada. Dan adanya kewajiban KPU untuk mengikuti masukan dari DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang bersifat mengikat.

Dalam hal ini pula, hasil rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah, KPU menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2016<sup>7</sup>, kemudian

---

<sup>7</sup> PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

memasukkan ketentuan Pasal ke dalam Peraturan KPU tersebut yang memperbolehkan atau mengizinkan terpidana percobaan ikut dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Adapun bunyi aturan tersebut tertuang didalam Pasal 4 ayat 1 huruf (f) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi syarat bahwa *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kelapaaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak didalam penjara”*. Ketentuan didalam Pasal 4 ayat 1 huruf (f) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 inilah yang dijadikan landasan KPU untuk meloloskan calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan. Perumusan aturan tersebut seolah menyamakan status terpidana percobaan dengan masyarakat pada umumnya yang dapat aktif bergerak diluar Lembaga Perasyarakatan dan bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi fokus dari penelitian ini, untuk menemukan problem solving<sup>8</sup>, dari pertentangan norma diatas. Namun pada prinsipnya pertentangan norma dalam aturan pemilihan

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 32.



kepala daerah ini akan berakhir ketika diselesaikan melalui revisi Undang-Undang dan uji materil di Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini, patokan penelitian akan merujuk pada kasus Rusli Habibie (Petahana Gubernur Provinsi Gorontalo) sebagai terpidana percobaan yang turut serta didalam Pilkada tahun ini dan dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU, selain dari itu juga Rusli Habibie telah melakukan uji materil (*judicial review*) terhadap ketentuan didalam Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi yang sementara ini masih dalam proses persidangan. Perkara tersebut terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register Perkara 71/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>9</sup>.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum persyaratan calon kepala daerah untuk Rusli Habibie sebagai terpidana Percobaan ?
2. Bagaimana hak politik Rusli Habibie sebagai calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan ?

---

<sup>9</sup> Dilihat di situs resmi Mahkamah Konstitusi [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Dalam penelitian ini difokuskan terhadap pengaturan syarat calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan, dengan meneliti status hak politik terpidana percobaan. Dalam hal ini, mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan melihat putusan terkait pasal yang diuji materil di Mahkamah Konstitusi.

### ***D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu***

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan rujukan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun kajian kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. **Gugum Ridho Putra.** *Hak Mantan Narapidana untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.* Skripsi (2012). Fakultas Hukum Universitas Indonesia, membahas tentang hak konstitusional Calon Kepala Daerah yang berstatus mantan narapidana, dan syarat-syarat sahnya Calon Kepala Daerah berstatus mantan narapidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Penelitian ini masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mengatur syarat calon kepala daerah. Untuk membahas hal ini akan dibagi menjadi dua pembahasan seperti berikut:

- a. Didalam Pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa calon kepala daerah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih. Kemudian dalam uji materil terhadap aturan tersebut melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang memberikan syarat-syarat konstitusional bahwa keberlakuan Pasal tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan meskipun ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan tidak juga mencakup kejahatan politik.
- b. Didalam Pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur hal yang sama sebelum perubahan yaitu bahwa calon kepala daerah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih. Setelah kemudian di uji materil kembali, maka lahir lagi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang kembali lagi memberikan syarat-syarat konstitusional (Putusan Konstitusional bersyarat) bahwa tidak berlaku bagi jabatan publik yang dipilih (*elected officials*),

berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 tahun sejak terpidana menjalani masa hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Setelah menguraikan hasil penelitian diatas, perlu kiranya untuk menguraikan hal-hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan penulis dilakukan. Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan yaitu: penelitian yang penulis lakukan merujuk pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sekarang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak berlaku lagi yang dilakukan penelitian diatas. Kemudian yang akan diteliti adalah status terpidana yang mengikuti pemilihan kepala daerah bukan status mantan narapidana berdasarkan skripsi diatas.

2. **Ahmad Quraissy.** *Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015* (Skripsi 2016)

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, membahas hak konstitusional calon kepala daerah dan syarat-syarat calon kepala daerah berstatus mantan narapidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor: 42/PUU-XIII/2015. Dalam penelitian ini berdasar pada Undang-

Undang Pemilihan Kepala Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang lalu. Sebelum diubah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur syarat calon kepala daerah terpidana di dalam Pasal 7 huruf (g) bahwa *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*. Kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 yang tertuang didalam Pasal 7 huruf (g) juga mengatakan bahwa *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*. Pasal tersebut tidak berbeda dengan Pasal yang diatur sebelum perubahan, namun yang membedakan dalam Pasal yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 menambahkan frasa didalam penjelasan Pasal 7 huruf (g) tersebut, yang dalam penjelasan mengatakan *“Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan*

*sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini*”. Pembatasan hak politik bagi mantan narapidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIII/2015 yaitu dalam amar putusannya mengatakan bahwa Pasal 7 huruf g (dinyatakan inkonstitusional bersyarat) sementara Pasal 45 ayat 2 huruf k dinyatakan bertentangan dengan UUD, sehingga ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Dalam Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diuji materiil tersebut, diputus inkonstitusional bersyarat yang berarti bahwa Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD secara bersyarat yakni sepanjang tidak dimaknai bahwa dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik bahwa bersangkutan adalah mantan terpidana. Demikian juga dengan penjelasan Pasal 7 huruf (g) dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 yang diteliti oleh saudara Ahmad Quraissy inilah yang dijadikan acuan untuk pencalonan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015.

Yang menjadi pembeda untuk penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang merupakan hasil revisi atas Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Namun, hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-

XIII/2015, merupakan tindak lanjut atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota saat ini. Selain dari itu, penelitian yang penulis lakukan atas status terpidana pencalonan kepala daerah tahun 2017 bukan mantan narapidana yang dimaksud dalam skripsi diatas.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum terpidana percobaan dalam proses pemilihan kepala daerah..
- b. Untuk mengetahui hak-hak politik yang berstatus terpidana percobaan.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai pengembangan dalam mengatur syarat calon kepala daerah untuk terpidana.
- b. Sebagai refensi awal untuk penelitian selanjutnya tentang hak politik bagi terpidana percobaan.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### **A. Beberapa Pengertian**

Ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang Dasar sebagai pijakan dasar suatu negara dan menjamin perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam hal ini rakyat yang berdiam dalam suatu negara. Rakyatlah tujuan utama dari segala bentuk perwujudan dalam Undang-Undang Dasar (UUD NRI 1945) . Dalam hal keterwakilan rakyat dalam pemerintahan, rakyat diwakili oleh pemimpin-pemimpin mulai dari tingkat pusat, daerah, kabupaten, kota sampai pada tingkat yang paling bawah, desa.

Prinsip kedaulatan rakyat sebelum perubahan UUD 1945 dilaksanakan sepenuhnya oleh perwakilannya dalam hal ini Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Setelah mengalami perubahan UUD 1945 generasi pertama<sup>10</sup> yang dimulai perubahan itu pasca reformasi pada tahun 1999-2002, MPR sudah tidak lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dengan demikian, pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut

---

<sup>10</sup> Menurut Saldi Isra, perubahan generasi pertama terjadi pasca tumbanganya Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto dan menuju Orde Reformasi atau Era Reformasi sampai sekarang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saldi Isra<sup>11</sup>, mengemukakan secara garis besar prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 setelah perubahan dibagi menjadi dua, yaitu prinsip esensial dan prinsip prosedural. Secara esensial, pengakuan, perlindungan dan penghormatan yang diatur terhadap hak asasi manusia membuktikan bahwa UUD 1945 memberikan roh atas hidupnya kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan wujud nyata dianutnya prinsip esensial demokrasi. Sementara secara prosedural, diwujudkan dalam pelaksanaan pemilihan secara langsung dan prinsip bertanggungjawab yang dapat dilihat dari sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, Negara menjamin hak-hak warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui Pemerintahan. Di dalam Pasal 28D ayat 3 UUD NRI 1945, menyatakan setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Aturan yang umum abstrak itu, memberi kesempatan kepada semua warganegara untuk turut andil dalam memajukan Negara melalui pemerintahan. Oleh karena itu dalam faham demokrasi hak politik merupakan hal yang prinsipil. Pada pokoknya, pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat-

---

<sup>11</sup> Saldi Isra dalam pengantar Khairul Fahmi, *Pemilihan & Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. vi.

syarat yang telah ditentukan berhak untuk ikut memilih (*to elect*) dan untuk dipilih (*to be elected*)<sup>12</sup>.

### 1. Pemerintah Daerah dan Calon Kepala Daerah

Didalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
- b. Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sehingga dapat dipahami bahwa Pemerintah Daerah disini dimaksud sebagai jabatan yang melekat pada diri seseorang pemimpin atau subjek penyelenggara pemerintahan di daerah, sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak hanya oleh Kepala Daerah tetapi juga terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam hal ini pendefinisian pemerintahan daerah terbagi atas pemerintahan dalam artian sempit, yang hanya menyebutkan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan juga pemerintahan dalam artian luas, dimana penyelenggara urusan pemerintahan termasuk juga DPRD.

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta Barat: Pt Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 775.

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>13</sup>, pemerintah diartikan sebagai subjek pemegang kekuasaan pemerintahan yang di tingkat pusat identik dengan presiden, dan di daerah identik dengan gubernur, bupati, atau walikota yang disebut sebagai pemerintah daerah beserta perangkat daerahnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini menjalankan tugas sebagai perwakilan dari pusat untuk menjamin terlaksananya hak-hak warganegara di daerah. Tugas pemerintah daerah, tidak akan mungkin terlaksana tanpa adanya kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan, sedangkan kekuasaan yang didapatkan oleh kepala daerah diperoleh dari suara rakyat atau dukungan rakyat terhadap kepala daerah untuk memimpin mereka. Rakyat dalam hal ini mempunyai hak untuk dipilih dan memilih sebagai bagian dari Negara ini. Berhubungan dengan dipilih menjadi bagian dari hak warganegara, maka seseorang yang akan dipilih itu, harus melewati tahap-tahap pencalonan sebagai kepala daerah.

### **Calon Kepala Daerah**

Salah satu proses untuk mendapatkan pemimpin ditingkat daerah yaitu dengan menjaring calon-calon pemimpin dari partai politik maupun menjaring pemimpin-pemimpin diluar partai politik yang dipercaya oleh rakyat atau yang diinginkan oleh rakyat sebagai pemimpin mereka. Calon pemimpin ini, atau yang disebut sebagai calon kepala daerah ketika telah dinyatakan lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, h. 414.

berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Calon Kepala Daerah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam ketentuan umumnya didalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) mengemukakan bahwa Calon Gubernur adalah peserta pemilihan umum yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya Calon Bupati dan Walikota, adalah peserta pemilihan umum yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Menjadi calon kepala daerah harus melewati tahapan yang diatur dalam Undang-Undang serta peraturan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Syarat menjadi calon kepala daerah, di dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 , kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sampai sekarang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menjadi hal yang paling sering menjadi sorotan dan mengalami banyak permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal atau butir yang merugikan hak-hak warganegara yang akan maju sebagai Calon kepala Daerah.

Dalam hal ini, yang menjadi penelitian ini juga terkait dengan syarat-syarat calon kepala yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun

2016. Permasalahan yang muncul adalah ketika dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur pasal 9 huruf (a) tentang kewajiban KPU untuk berkonsultasi kepada DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang bersifat mengikat untuk menyusun dan menetapkan peraturan KPU, sehingga peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 memasukkan Pasal 4 ayat 1 huruf (f) bahwa calon kepala daerah *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara”*. Frasa yang bertanda tebal, bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 mengatakan bahwa calon kepala daerah *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum* atau bagi mantan narapidana telah *secara terbuka dan jujur mengemukakan bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*. Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara masih berstatus sebagai narapidana walaupun diluar penjara atau Lembaga Permasyarakatan. Terpidana yang tidak menjalankan pidana dalam penjara dikatakan pula sebagai pidana percobaan, yakni menjalani pidana diluar penjara dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh hakim, yakni

tidak mengulangi tindak pidana yang sama tapi hanya untuk pidana penjara yang dibawah 1 tahun yang diberikan pidana percobaan.

## 2. Terpidana Percobaan

Terpidananya seseorang akibat perbuatan melawan hukum dapat mengganjal hak politiknya didalam pemerintahan. Jika seseorang yang dirampas kemerdekaannya di dalam lembaga permasyarakatan, dipastikan tidak dapat menjalankan hak sosialnya dan hak politiknya untuk turut serta dalam pemerintahan. Berbeda dengan terpidana yang menjalankan pidananya di dalam Lembaga Permasyarakatan, terpidana percobaan di dalam KUHP, Pasal 14a memungkinkan untuk terpidana dapat menjalankan pidananya diluar lembaga permasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini terjadi ketika hakim memutuskan dalam putusannya bahwa terpidana, dihukum dengan masa percobaan. Dihukum dengan masa percobaan berarti terpidana masih dalam pengawasan atau pembinaan oleh Balai Permasyarakatan (BAPAS)<sup>14</sup>.

Didalam KUHP, hukuman percobaan diatur didalam Pasal 14a sampai 14f. Kemudian dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Eddy O.S. Hiariej menggunakan istilah Pidana bersyarat dan Pidana Percobaan untuk terpidana percobaan. Eddy O.S Hiariej<sup>15</sup>, mengemukakan bahwa pidana percobaan atau pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif dari pemidanaan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris. Di Inggris,

---

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan

<sup>15</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 405.



ada petugas pidana bersyarat (pidana percobaan) memiliki kewajiban antara lain membuat penilaian terhadap pelaku individu dan memberi laporan penilaian kepada pengadilan, berupaya mengubah perilaku pelanggar hukum dan mengurai risiko kejahatan serta mengubah dampak dari kejahatan korban<sup>16</sup>. Kemudian Eddy O.S Hiariej menambahkan bahwa seorang terpidana yang dijatuhkan hukuman percobaan berarti pengadilan mengutamakan fungsi rehabilitatif dengan melihat jenis tindak pidana yang dilakukan, motivasi terpidana melakukan perbuatan, dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut<sup>17</sup>.

Sedangkan R.Soesilo, menggunakan istilah Penghukuman bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) untuk memaknai terpidana percobaan. Menurut R.Soesilo<sup>18</sup>, penghukuman bersyarat itu dapat disebutkan pula “penghukuman dengan perjanjian” atau “penghukuman secara janggelan”, yang artinya adalah menjatuhkan hukuman kepada seseorang, akan tetapi hukuman ini tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata, bahwa terdakwa sebelum habis tempoh percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim, jadi keputusan hukuman tetap ada, tetapi hanya pelaksanaan hukuman itu yang tidak lakukan.

---

<sup>16</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, h. 405.

<sup>17</sup> Eddy O.S Hiariej sebagai Ahli Pemohonan dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 perihal pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 (Acara Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon VI) hal. 6. (Diakses melalui website resmi Mahkamah Konstitusi-[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id))

<sup>18</sup> R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus* (Bogor: Politeia, 1979), h. 62-63.

Dengan demikian, terpidana percobaan bukanlah orang yang berstatus sebagai narapidana yang tercatat di Lembaga Perasyarakatan<sup>19</sup>. Namun, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>20</sup>. Adapun terpidana percobaan yang dijalankan tidak didalam Lembaga Perasyarakatan biasanya tergolong sebagai kejahatan ringan.

### 3. Ruang Lingkup Hak Politik Secara Konstitusional

Dalam konstitusi dikenal adanya hak politik warga negara yaitu hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dalam pemerintahan. Didalam Pasal 28D ayat 3 secara gamblang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Walaupun dalam Pasal *a quo* tidak menyebut secara eksplisit terkait hak untuk dipilih dan memilih tersebut, namun secara implisit dapat difahami melalui kata “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Selanjutnya Jimly Asshiddiqie<sup>21</sup>, mengurai 4 hak yang mencakup hak-hak politik yaitu:

1. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
2. Hak untuk berkumpul dan berserikat
3. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum
4. Hak untuk memilih dan dipilih

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat 7 juncto Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perasyarakatan.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perasyarakatan.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. h. 623.

Oleh karena itu pula, hak politik ini juga digolongkan sebagai hak asasi manusia generasi pertama bersama hak sipil. Karel Vasak<sup>22</sup>, seorang ahli hukum terkemuka Perancis melalui semboyan perjuangan Revolusi Perancis membagi 3 (tiga) Perjuangan Generasi HAM yaitu kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*). Untuk perjuangan hak sipil dan politik itu sebagai Perjuangan Generasi Pertama HAM yang muncul karena Negara pada abad ke-17 dan 18 dipimpin oleh para raja yang memerintah secara mutlak. Dengan demikian perjuangan HAM yang pertama lebih kepada pengakuan atas kedaulatan individu yang menentang adanya kepemimpinan raja secara absolut. Sehingga menurut Granston<sup>23</sup> bahwa hak sipil dan hak politik merupakan hak asasi manusia dalam arti sebenarnya. Karena dalam tataran pragmatis bahwa hak sipil dan politik dapat segera dilindungi oleh Negara yang tergolong sebagai kebebasan dari (*freedom from*) sedangkan hak-hak yang lain seperti ekonomi sosial dan kultural perlu implementasi yang progresif untuk mewujudkan hak tersebut<sup>24</sup>. Sehingga menurut Jumadi<sup>25</sup>, dalam konsepsi generasi pertama ini, elemen dasarnya mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

---

<sup>22</sup> Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 11.

<sup>23</sup> Jumadi, *Refleksi Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 21.

<sup>24</sup> Jumadi, *Refleksi Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. h. 21.

<sup>25</sup> Jumadi, *Refleksi Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. h. 107.

Berbicara tentang hak politik tidak lepas dari pelaksanaan dalam kehendak Negara<sup>26</sup>. Karena dalam hal pemerintahan, setiap warga Negara terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk kepentingan Negara itu sendiri. Misalnya dalam pemilihan kepala daerah, suara rakyat yang terpilih secara demokrasi menghasilkan pemerintah daerah yang akan melaksanakan pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya dalam daerah tersebut tanpa kecuali. Sehingga suara rakyat yang terbelah sekalipun dalam menentukan siapa yang akan memerintah, tetap akan menjadi bagian dari pemenuhan hak-hak tersebut. Disitulah peran secara tidak langsung oleh pemilih dalam memilih pemerintah. Sehingga hak politik dalam pemerintahan terwujud sebagaimana mestinya.

Pengakuan hak politik juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Didalam Undang-Undang HAM diatur didalam Pasal 43 ayat 1, 2 dan 3 sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

---

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, terj. Somardi, *Teori Umum Hukum Dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), h. 110-112.

Sedangkan didalam Undang-Undang Pengesahan Konvensi Internasional diatur di Pasal 25 yaitu:

- (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
- (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Secara perundangan-undangan baik melalui Undang-Undang Dasar, Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik telah diakomodasi terkait hak politik setiap warga negara. Dalam pembuatan hak-hak politik tersebut juga tidak terlepas dari hak warga negara yang terbagi dalam dua kategori yaitu hak untuk dipilih dan memilih. Dimana hak untuk memilih yang berperan untuk memberikan suara kepada yang dipilih dapat berperan secara tidak langsung dalam penyusunan Undang-Undang serta hak dari mereka yang terpilih untuk menjadi anggota parlemen agar dapat mengambil keputusan dalam pemerintahan secara langsung, itu semualah yang merupakan hak politik<sup>27</sup>. Dalam pemberlakuan hak politik tidak bisa disamakan kepada setiap warga negara secara keseluruhan. Misalnya dalam hak untuk memilih diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang yang harus sudah mencapai umur yang ditentukan. Begitu juga dengan hak untuk dipilih tidak serta merta semua warga negara mempunyai hak untuk

---

<sup>27</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2014), h.157-158.

dipilih dalam pemerintahan. Ada syarat-syarat tertentu yang ditentukan menurut Undang-Undang, bisa karena batasan umur, tidak sedang terpidana atau dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan dan hal lainnya yang diatur dalam Undang-Undang.

### **B. Syarat -Syarat Calon Kepala Daerah**

Dalam pemerintahan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat 3 UUD NRI 1945<sup>28</sup>. Namun dalam kesempatan hak yang sama itu, tidak dimaksudkan bahwa semua warga negara untuk memimpin atau menjadi pemimpin di suatu daerah atau Negara. Menurut Rousseau<sup>29</sup>, bahwa dalam kenyataannya yang sedikitlah yang memimpin yang banyak. Kemudian terpilihnya pemimpin juga tergantung corak atau bentuk Negara yang dianutnya. Bisa karena keturunan (Monarki), bisa juga secara pemilihan (Demokrasi) sehingga mereka dapat mewakili rakyat yang berdiam dalam suatu wilayah tersebut.

Kemudian, syarat-syarat atau batas yang harus dimiliki seorang calon itulah yang menjadi landasan dapat tidaknya seseorang memimpin untuk menjalankan amanat orang banyak. Syarat itu diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai legitimasi untuk terwujudnya kepemimpinan. Dalam perjalanan legitimasinya, Undang-Undang yang

---

<sup>28</sup> Bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

<sup>29</sup> Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum: Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. DR. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 62.

mengatur syarat pemilihan calon kepala daerah sudah banyak, namun terus mengalami pergantian Undang-Undang dan perubahan terhadap Undang-Undang sebelumnya.. Sehingga syarat-syarat pengaturan pemilihan kepala daerah akan dibahas berdasarkan Undang-Undang kontemporer yang menjadi tumpuan legitimasi pemilihan kepala daerah serentak mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun uraiannya tentang syarat calon kepala daerah yang akan dibahas hanya berkaitan dengan terpidana atau mantan terpidana yang menjadi objek penelitian, sebagai berikut:

**1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.**

Setelah adanya penolakan yang massif oleh rakyat mengenai hak pilih mereka yang diambil alih oleh perwakilan (DPRD) melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Maka dengan cara memilih pemimpin secara tidak langsung atau sistem perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan meniadakan atau merenggut kedaulatan rakyat serta tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang harusnya rakyat sendiri yang memilih pemimpin agar tetap ada dan terjaga kontrak politik yang dipilih dengan yang memilih, yaitu antara calon kepala daerah sebagai orang yang dipilih dengan rakyat sebagai pemilihnya. Melalui Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) membatalkan atau mencabut Undang-



Undang Nomor 22 Tahun 2014 sebelumnya yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota melalui mekanisme pemilihan secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-Undang yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian dalam Undang-Undang *a quo* mengatur syarat calon kepala daerah mengenai mantan narapidana dalam Pasal 7 bab tentang persyaratan calon. Dalam Pasal 7 huruf (g) calon harus memenuhi persyaratan yaitu ***“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”***. Maka dengan demikian, calon harus tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih. Oleh karena itu, bagi seseorang yang berstatus mantan narapidana dan kembali ke masyarakat namun pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih, dapat dipastikan kehilangan hak politiknya sebagai warga negara dan tidak diperbolehkan menjadi calon kepala daerah berdasarkan Pasal *a quo*. Lain halnya dengan status mantan narapidana yang telah menjalani masa pidananya, yang ancaman hukuman pidana penjaranya dibawah lima tahun mempunyai legalitas untuk mengikuti pencalonan sebagai calon kepala daerah.

Dalam ketentuan ini, dapat dilihat sebagai corak yang diskriminatif karena hanya berdasarkan ancaman hukuman yang membedakan bagi seseorang yang hendak turut serta dalam pemerintahan. Sehingga seharusnya, siapapun yang setiap warga negara yang telah keluar dari Lembaga Perasyarakatan harus diyakini sebagai orang yang sudah bersih dari tindak kejahatannya dan harus diberikan hak-hak politiknya untuk dipilih dalam pemerintahan.

Adapun untuk status hukuman percobaan (terpidana percobaan) yang diancam hukuman dibawah lima tahun, dapat memenuhi persyaratan sebagai calon sebagaimana yang dimaksud Pasal *a quo*, dan lagipula pidananya dilaksanakan tidak didalam Lembaga Perasyarakatan sehingga dapat mendaftarkan diri sebagai calon.

## **2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.**

Setelah diundangkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dirasakan masih terdapat beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan<sup>30</sup>. Dengan demikian diadakan beberapa penyempurnaan melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut. Dalam perubahan tersebut dilakukan beberapa penyempurnaan sebelum menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap pertama

---

<sup>30</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

pada 9 Desember 2015. Sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Adapun hal yang menjadi penyempurnaan dalam menentukan syarat-syarat kepala daerah dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang *a quo*, bahwa untuk persyaratan calon kepala daerah dilakukan bertujuan agar lebih tercipta kualitas calon kepala daerah supaya memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas serta memenuhi akseptabilitas.

Perubahan yang dilakukan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 agar pelaksanaan untuk menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahap pertama yang terselenggara pada tanggal 9 Desember 2015 dapat sesuai dengan harapan publik. Sehingga persyaratan calon kepala daerah yang berstatus mantan narapidana kembali diatur didalam Pasal 7 huruf (g) yang mengatakan bahwa calon ***“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lebih”***. Kemudian didalam penjelasannya mengatakan bahwa ***“persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku***

***kejahatan yang berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara dengan alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”.***

Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebelumnya, yang hanya mengatur bahwa calon yang ingin maju dalam pemilihan harus memenuhi persyaratan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, tidak memperbolehkan seseorang calon kepala daerah yang pernah diancam atau didakwakan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Tetapi didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 ini, memberikan jalan bagi calon kepala yang pernah diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih untuk maju sebagai calon dengan harus melewati satu masa jabatan atau dalam masa 5 tahun setelah menjalani masa pidananya. Kemudian harus mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa calon tersebut pernah dipidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Namun Pasal 7 (g) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 berserta penjelasannya diuji materil ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat bahwa dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Sehingga landasan hukum untuk syarat calon yang berstatus mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang lalu, mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dengan demikian untuk status terpidana percobaan juga tidak memenuhi syarat calon kepala daerah, karena masih berstatus sebagai terpidana.

**3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap pertama pada tahun 2015 mengacu pada aturan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Setelah proses demokrasi tahap pertama itu dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 kemarin, masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perubahan kedua ini dilakukan demi memantapkan aturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahap kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017. Adapun beberapa penyempurnaan Undang-Undang ini yaitu menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konsitusi yang diuji materilkan aturan hukum pilkada tahap pertama kemarin (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015). Berdasarkan tidaklanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 melahirkan Pasal 7 ayat 2 huruf (g) didalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dimana pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya menyebut mantan terpidana yang telah mengemukakan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang dapat memenuhi syarat sebagai calon. Sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu pula, secara implisit bahwa terpidana tidak memenuhi syarat syarat sebagai calon.

Atas Putusan Mahkamah Konstitusi itu pula, revisi Undang-Undang 10 Tahun 2016 di Pasal 7 ayat 2 huruf (g) mengatakan bahwa calon *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*. Dalam penjelasannya mengatakan *“Yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak”*. Adapun maksud yang sederhana dapat dimengerti mengenai mantan terpidana ini melalui penjelasan diatas bahwa mantan terpidana tersebut dapat dikatakan mantan

narapidana yang telah menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan sebagai terpidana<sup>31</sup>.

Berbeda dengan aturan hukum sebelumnya, baik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 yang mengatakan “**tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih**”. Namun dalam Undang-Undang perubahan kedua ini (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), mengatur bahwa tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi baik itu ancaman pidana yang 5 (lima) tahun, lebih dari 5 (lima) tahun atau dibawah 5 (lima) tahun atau ancaman pidana berapapun, kalau sudah divonis terpidana oleh pengadilan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.

Maka dari itu, untuk terpidana percobaan ketika sudah divonis bersalah oleh pengadilan maka tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah untuk tahun 2017 ini berdasarkan Undang-Undang *a quo*. Kecuali ketika sudah berubah statusnya menjadi mantan narapidana atau sudah tidak menjalani pidana percobaan barulah dapat diterima sebagai calon kepala daerah.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemilihan**

Dalam pengisian jabatan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah terdapat mekanisme pemilihan dalam

---

<sup>31</sup> Untuk mengetahui lebih jelas arti “terpidana” sebaiknya kita melihat Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Lihat juga, Damang dan Muh. Nursal NS, Carut Marut Pilkada Serentak 2015 (Makassar: Philosophia, 2016), h. 64-71.

pengisian jabatannya. Pemilihan yang dihasilkan melalui mekanisme yang dianut suatu negara merupakan legitimasi bagi pemerintah atas yang diperintah (rakyat). Maurice Duverger<sup>32</sup>, mengemukakan bahwa nilai dari suatu pemerintahan tergantung pada orang yang memerintah, itu sebabnya cara orang-orang pemerintah yang dipilih merupakan salah satu sendi pokok dalam pemerintahan.

Disetiap Negara mempunyai sistem pemilihan tersendiri dalam pengisian jabatan seperti kepemimpinan seorang Raja, Presiden, Perdana Menteri, Kepala Negara bagian ataupun Kepala pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk memberikan penjelasan tentang sistem pemilihan itu sendiri.

## 1. Pengertian Sistem Pemilihan

Untuk membahas sistem pemilihan, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu pengertian masing-masing, tentang apa yang dimaksud sistem dan pemilihan itu. Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya<sup>33</sup>, sedangkan pemilihan yang umum diketahui adalah cara memilih calon pemimpin dalam suatu Negara untuk dijadikan sebagai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>32</sup> Maurice Duverger, *Les Regimes Politiques*, terj. Suwirjadi, *Teori Dan Praktek Tatanegara* (Djakarta: Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakyat N.V, 1951), h. 12.

<sup>33</sup> kbbi.kemendikbud.go.id



Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan adalah suatu prosedur yang teratur untuk memilih orang-orang yang memerintah agar terbentuknya suatu pemerintahan.

Dalam sistem pemilihan untuk mengangkat pejabat yang akan mengisi jabatan tertentu di Indonesia dapat diangkat dengan cara pemilihan umum langsung yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Kepala Daerah, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, dan Kepala Desa<sup>34</sup>. Selain dari itu, sistem pemilihan untuk mengangkat pejabat yang akan mengisi jabatan tertentu dengan cara pemilihan secara tidak langsung atau melalui perwakilan seperti untuk mengangkat Pimpinan Legislatif, Hakim-hakim Agung dan Konstitusi, Pimpinan BPK, Dewan Gubernur, Panglima TNI, Kapolri, KPU, Anggota Komnas HAM, Anggota KY, Pimpinan KPK, Anggota KPPU, Anggota KPI dan lainnya<sup>35</sup>.

## 2. Pembagian Jenis Pemilihan

Jenis pemilihan merupakan ciri khas yang berlaku bagi suatu Negara untuk mengisi jabatan pemerintahan. Cara memilih untuk menunjuk seseorang dalam pemerintahan biasanya yang umum dikenal adalah melalui pemilihan langsung yang menganut paham demokrasi. Hampir setiap Negara pada saat ini, mengaku dirinya sebagai Negara penganut demokrasi dengan adanya campur tangan rakyat dalam

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. h. 751.

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. h. 751-752.

menentukan siapa yang layak dijadikan pemimpin. Namun tidak semua jenis pemilihan hanya berdasarkan suara terbanyak dari rakyat (demokrasi). Bagi Maurice Duverger<sup>36</sup>, membagi jenis pemilihan itu dalam dua kategori, yaitu Demokrasi dan Otokrasi. Jenis pemilihan demokrasi yaitu dengan menyerahkan pemilihan orang-orang pemerintah (*pangreh*) kepada yang diperintah (*direh*). Berbeda dengan jenis pemilihan demokrasi, Jenis pemilihan Otokrasi (*autokrasi*) adalah menjauhkan orang-orang diperintah dari orang yang memerintah. Jenis pemilihan ini biasanya dikenal oleh kepemimpinan yang diktator. Misalnya pergantian kepemimpinan yang dilakukan karena keturunan, seperti Raja dalam suatu Negara. Walaupun tidak semua pergantian kepemimpinan berdasarkan turun temurun tersebut bersifat diktator. Karena pada zaman modern ini, biasanya Raja hanya sebagai simbol suatu Negara, bukan sebagai orang yang menjalankan pemerintahan.

Lain halnya dengan G.J Wolhoff<sup>37</sup>, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia mengemukakan 3 (tiga) macam prosedur dalam pemilihan dari status hukum privat menjadi status hukum publik yaitu pelantikan berdasarkan keturunan atau berprinsip geneologis (kekeluargaan) dan bersifat tradisi yang turun temurun diperlukan untuk memerintah berdasarkan ikatan keluarga tertentu karena diperkuat ketika kepercayaan rakyat masih bersifat kharismatik yang

---

<sup>36</sup> Maurice Duverger, *Les Regimes Politiques*, terj. Suwirjadi, *Teori Dan Praktek Tatanegara*. h. 12-13.

<sup>37</sup> G. J. Wolhoff, *Pengantar Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Djakarta: Timun Mas, 1955), h. 267.

masih dikuasai oleh kepercayaan pada kekuatan gaib (kesaktian) keluarga-keluarga bangsawan yang dipandang keturunan yang istimewa. Yang kedua, berdasarkan pengangkatan oleh organ lain berdasarkan kecakapan yaitu pemerintahan hanya dapat dijalankan dengan menggunakan orang-orang yang ahli dibidangnya dan sistem ini berkembang didalam Negara Modern yang maju. Yang terakhir, pemilihan oleh rakyat berdasarkan kepercayaan yang diperoleh karena yang bersangkutan dapat dipercaya oleh rakyat untuk mewakili mereka berdasarkan keinginan rakyat yang dimana sistem ini berkembang di pemerintahan yang demokratis.

Macam-macam sistem pemilihan selanjutnya yang dikenal dalam ilmu politik berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu<sup>38</sup>:

1. *single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik),
2. *multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *Proportional Representation* atau Sistem Perwakilan Berimbang)

Sistem Distrik (*single-member*) merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan pada kesatuan geografis karena daerahnya yang kecil sehingga hanya ada satu calon untuk mewakili di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk calon dengan perolehan suara terbanyak dianggap sebagai pemenang bagaimanapun kecilnya perselisihan suara yang diperoleh. Sehingga jumlah suara yang kalah tidak diperhitungkan sama sekali. Sedangkan, Sistem Perwakilan Berimbang (*multi-member*) merupakan sistem yang berdasarkan perwakilan golongan atau partai yang

---

<sup>38</sup> Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia, 1986), h.177.

telah ditetapkan berdasarkan suara untuk satu kursi. Sehingga jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai sesuai dengan dengan jumlah suara yang diperoleh.

Selanjutnya akan dikemukakan pula sistem pemilihan umum, menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Sistem pemilihan umum, terdapat dua macam yaitu berdasarkan Sistem Pemilihan Mechanis dan Organik<sup>39</sup>. Sistem Pemilihan Mechanis, merupakan sistem yang mengutamakan individu dalam hal ini rakyat sebagai orang yang mempunyai hak pilih aktif (pemilih) yang mempunyai satu suara untuk dirinya dalam setiap pemilihan. Dalam pelaksanaannya kemudian, sistem pemilihan mekanis ini dilaksanakan dengan dua cara yaitu<sup>40</sup>:

1. Sistem perwakilan distrik/ mayoritas/ single member constituencies,
2. Sistem [sic] perwakilan proporsional.

Dalam Sistem Perwakilan distrik hanya ada satu wakil dan perhitungan suaranya berdasarkan suara mayoritas dengan tidak adanya gabungan suara. Sehingga tidak perlu suara mayoritas mutlak. Sebagai contoh jika Calon A mendapatkan suara 10.000 sedangkan yang tidak terpilih dari calon B, C dan D memperoleh suara 17.000, maka tetap yang mewakili rakyat tersebut calon A di Badan Perwakilan Rakyat. Sedangkan, Sistem Perwakilan Proporsional adalah sistem dimana presentase kursi di

---

<sup>39</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta Selatan: Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, 1981), h. 333.

<sup>40</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. h. 335.

Badan Perwakilan dibagikan berdasarkan suara yang didapatkan oleh masing-masing partai. Contohnya, jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilihan umum adalah 10.000.000 orang dan jumlah kursi untuk masuk di Badan Perwakilan Rakyat 100 kursi. Sehingga setiap orang calon dibutuhkan suara 100.000. Pembagian kursi tersebut, tergantung kepada berapa jumlah suara yang diperoleh disetiap partai politik yang ikut pemilihan.

Dalam Sistem pemilihan organis, berbeda dengan sistem pemilihan mekanis. Karena sistem pemilihan organis ini, tidak memerlukan partai politik yang dipilih untuk mewakili rakyat karena akan diwakili oleh tiap-tiap persekutuan yang hidup melalui pengangkatan<sup>41</sup>. Sebagai contoh, sebelum reformasi yang pernah kita kenal, terdapat utusan-utusan golongan didalam Majelis Perwakilan Rakyat seperti utusan Cendekiawan, utusan Akabri, dan utusan golongan lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

---

<sup>41</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. h. 334.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif (Yuridis) dan Empiris dengan menganalisis kasus untuk mengklarifikasi tentang suatu fenomena yang terjadi dilapangan dengan cara menggambarkan sejumlah variabel yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti<sup>42</sup>. Dalam hal ini, mencari isu hukum (*legal issue*) yang terjadi dalam praktek dalam meloloskan calon kepala daerah. Peter Mahmud Marzuki<sup>43</sup> mengemukakan, adapun isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila:

1. Para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri,
2. Terjadi kekosongan hukum,
3. Terdapat penafsiran perbedaan atas fakta.

Setelah adanya isu hukum (*legal issue*), kemudian penelitian ini melakukan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)<sup>44</sup> dan pendekatan kasus (*Case Approach*)<sup>45</sup>, yang bersifat *grounded* atau berpijak pada kenyataan yang sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Sehingga

---

<sup>42</sup> Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Nasional dan Perspektif Hukum Internasional*, h. 8.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h.103.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 136-158.

<sup>45</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 21.

dalam kejadian tersebut terjadinya pertentangan norma didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, jenis penelitian ini dilakukan dengan analisis kasus yang menjadi variabel penelitian yaitu terhadap Rusli Habibie sebagai terpidana percobaan yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017.

## **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan Yuridis/Perundang-Undangan: yaitu dengan suatu metode yang digunakan melalui peraturan perundang-undangan dengan melihat Undang-Undang Pemilihan dalam menentukan calon kepala daerah kemudian melihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 dalam menentukan syarat calon kepala daerah. Dan pendekatan kasus, melalui Rusli Habibie sebagai terpidana percobaan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017.

## **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

### **1. Jenis Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>46</sup>, bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan-

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181.

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pula, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi yang dimaksud tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan<sup>47</sup>.

## 2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181.



- 1) Buku-buku atau literatur, yang membahas terpidana percobaan atau pidana bersyarat didalam buku-buku hukum pidana, buku hukum tata negara, buku hukum pemerintah daerah dan buku pemilihan kepala daerah.
- 2) Karya ilmiah berupa skripsi atau jurnal, khusus yang membahas pemilihan kepala daerah dan syarat pemilihan kepala daerah sebelumnya yang diteliti.

#### **D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan risalah sidang yang terdapat di situs resmi Mahkamah Konstitusi ([www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)), melihat hasil penelitian terkait syarat mantan narapidana yang maju dalam pemilihan kepala daerah melalui Skripsi, serta melihat putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga dengan mengumpulkan bahan literatur (buku), jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### ***A. Ketentuan Hukum Persyaratan Calon Kepala Daerah Untuk Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan***

Dalam penyelenggaraan pemilihan untuk mengisi jabatan pemerintahan yang harusnya paling berperan aktif adalah rakyat sebagai konstituen dalam menentukan calon pemangku jabatan. Seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie<sup>48</sup>, bahwa pemilihan umum selain merupakan perwujudan kedaulatan rakyat juga merupakan sarana pelaksanaan hak asasi warga negara itu sendiri. Karena itu, hak pilih merupakan hak yang harus dilindungi dan dijamin sebagai hak dasar atau hak asasi warga negara dalam aturan-aturan hukum negara yang demokratis di bawah negara berdasarkan the rule of law<sup>49</sup>. Lebih lanjut, Aswanto<sup>50</sup> mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan berwawasan Hak Asasi Manusia merupakan keharusan, bahkan cara pandang baru yang dikembangkan untuk memahami berbagai fenomena pemerintahan dengan masyarakat, sekaligus diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menata pembangunan/menyempurnakan format pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 420.

<sup>49</sup> Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi*. (Malang: Setara Press, 2013), h. 160.

<sup>50</sup> Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan (Relasi Hukum, Politik dan Pemilu)*. (Yogyakarta: Rangkang education, 2012), h. 144-145.

Dengan demikian, untuk menjalankan pelaksanaan hak asasi warga negara tersebut, Negara telah mengatur syarat dan ketentuan-ketentuan menjadi pemimpin untuk rakyat sehingga setiap calon pemangku jabatan pemerintahan, harus melalui tahap-tahap yang telah diatur oleh Lembaga Pemilihan (KPU/D), seperti pendaftaran calon, kampanye, pemilihan dan lainnya. Semua itulah yang menjadi bentuk terwujudnya kedaulatan rakyat melalui tahap verifikasi calon oleh Lembaga Pemilihan, tahap kampanye untuk menyakinkan pemilih dan sampai pada tahap pemilihan yang menjadi otoritas rakyat dalam menentukan pilihannya. Dari hulu ke hilir pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tentu yang mengawasi adalah Negara dalam hal ini Lembaga Pemilihan (KPU/D). Sehingga dalam persyaratan calon pun harus melewati aturan yang dibuat oleh pelaksana pemilihan yaitu KPU/D tetapi juga harus berlandaskan Undang-Undang yang ada.

Peran rakyat secara tidak langsung melalui perwakilan mereka di DPR yang pada intinya berperan merumuskan syarat-syarat orang-orang yang akan menjadi pelayan mereka nantinya. Sehingga dibuat aturan sedemikian ketatnya untuk persyaratan-persyaratan calon yang ingin menjadi pemimpin di daerah.

Untuk Undang-Undang pemilihan khususnya pemilihan Kepala Daerah telah dilembagakan oleh DPR, melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun aturan yang khusus mengatur syarat calon kepala daerah terdapat didalam

Pasal 7 ayat 1 dan 2. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 yang mengatur teknis pelaksanaan berdasarkan aturan hukum umum yang mengatur pemilihan kepala daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Dalam peraturan umum mengenai pemilihan kepala daerah dan peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis tersebut terjadi perbedaan dalam menentukan syarat calon kepala daerah khususnya yang berstatus terpidana. Karena didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota melarang terpidana untuk mengikuti tahapan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Namun, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah meloloskan terpidana, dalam hal ini terpidana yang berstatus “terpidana percobaan”.

Sehingga dalam tataran prakteknya Lembaga Negara yang mengurus hal ihwal pemilihan kepala daerah, dalam hal ini KPU/D terpaksa meloloskan calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan akibat campur tangan DPR dan Pemerintah. Tugas dan wewenang KPU, dalam mengatur Peraturan KPU dan pedoman teknis pencalonan pemilihan kepala daerah dicampuri oleh DPR dan Pemerintah dengan dasar hukum Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur ihwal rapat dengar pendapat DPR dan Pemerintah yang bersifat mengikat sehingga melahirkan frasa yang meloloskan terpidana percobaan.

Dalam membahas kasus Rusli Habibie ini, akan diurai pembahasan menjadi 4 (empat) bagian yaitu, pertama, ketentuan hukum persyaratan calon kepala daerah untuk Rusli Habibie sebagai terpidana percobaan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang tidak memperbolehkan terpidana ikut dalam pemilihan kepala daerah. Kedua, hubungan lolosnya Rusli Habibie sebagai calon kepala daerah dikarenakan adanya aturan hukum yang diatur bahwa rapat dengar pendapat yang bersifat mengikat oleh DPR dan Pemerintah dalam Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur ihwal DPR dan Pemerintah turut serta dalam tugas dan wewenang KPU yang bersifat mengikat. Ketiga, ketentuan hukum bagi status terpidana percobaan Rusli Habibie dalam pencalonannya sebagai kepala daerah dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencalonan pemilihan kepala daerah yang meloloskan calon kepala daerah berstatus terpidana, namun tidak menjalani pidananya dalam penjara (terpidana percobaan). Dan yang keempat, solusi dari pertentangan peraturan perundang-undangan dalam hal syarat calon kepala daerah yang berstatus terpidana dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 ini.

**1. Pasal 7 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Ketiga Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak yang mulai diadakan pertama kalinya pada 9 Desember tahun 2015 dan yang kedua 15 Februari tahun 2017 baru-baru ini.

Landasan hukum yang mengatur pemilihan kepala daerah ini bukanlah tanpa hambatan. Bahwa setelah dilembagakannya Undang-Undang khusus pemilihan kepala daerah ini yang merupakan pecahan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah selalu mendapatkan penolakan dari rakyat baik itu yang diuji materil di Mahkamah Konstitusi maupun penolakan yang massif dari rakyat terkait pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang hendak dilaksanakan pemilihan perwakilan melalui DPRD (secara tidak langsung) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. Yang didalam Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 mengatakan:

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.

Namun, akibat penolakan yang massif dari rakyat pada saat pemerintahan SBY waktu itu, Undang-Undang tersebut hanya berlaku sehari setelah diundangkan sekaligus dicabut pada hari dan tanggal yang

sama pada tanggal 2 Oktober 2014<sup>51</sup> sehingga diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 untuk mengembalikan pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Kendala-kendala tersebut menjadi bagian dari sejarah pembentukan peraturan Undang-Undang khususnya yang mengatur pemilihan kepala daerah. Namun dalam perjalanan legalitasnya perubahan Pasal dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat dihindari karena berhubungan langsung tentang hak politik setiap warga negara.

Untuk hal ihwal yang mengatur persyaratan calon kepala daerah sendiri telah banyak diuji materilkan di Mahkamah Konstitusi. Misalnya hak politik bagi keluarga petahana, calon tunggal, maupun calon yang pernah berstatus sebagai terpidana. Dalam hal pencalonan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (g) yang baru diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 merupakan kumpulan aturan yang telah diatur di dalam Undang-Undang sebelumnya dan kemudian di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, sehingga mengatur Pasal terkait pencalonan bagi terpidana dan mantan terpidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 menafsirkan bahwa yang hanya memiliki legitimasi sebagai calon kepala daerah adalah mantan terpidana yang secara jujur dan terbuka telah mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

---

<sup>51</sup> Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h. 4.

Sehingga aturan tersebut menjadi acuan dalam pemilihan kepala daerah tahap pertama tahun 2015 yang lalu. Dalam hal legitimasi Rusli Habibie sebagai calon kepala daerah yang berstatus sebagai terpidana percobaan untuk pemilihan kepala daerah tahun 2017 ini. Diatur secara tegas dan jelas didalam Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, bahwa calon kepala daerah harus tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana yang mengemukakan secara jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Sehingga Rusli Habibie dalam pencalonan kepala daerah jika mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ini, tidak dapat memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.

Oleh karena itu, landasan hukum untuk terpidana atau mantan terpidana sudah jelas diatur dalam Pasal *a quo* sehingga tidak memungkinkan bagi terpidana untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 ini. Sehingga untuk kasus Rusli Habibie yang ikut dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 ini, tidaklah tepat dan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terdapat di Pasal 7 ayat 2 huruf (g) tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sangat dimungkin pula ketika ada kemudian kalangan yang akan mempertanyakan legitimasi dari Rusli Habibie yang sekarang terpilih sebagai Gubernur Gorontalo dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 ini.



## 2. Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Lolosnya Rusli Habibie sebagai calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 ini bisa dikatakan tidak lepas dari pengaruh DPR dan Pemerintah dalam mengatur payung hukum Undang-Undang Pilkada. Karena fungsi DPR dan Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang dimanfaatkan betul dalam hal ini ikut juga dalam pembuatan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016. Didalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan mengatakan bahwa:

Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan **setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah** dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Dengan demikian, dapat diartikan pula bahwa DPR dan Pemerintah juga ikut mengatur peraturan KPU yang bukan merupakan tugas dan wewenangnya sebagai Lembaga Negara pembuat Undang-Undang. Kalaupun misalnya DPR dan Pemerintah hendak mengatur hal yang berkaitan dengan terpidana yang hukumannya ringan untuk ikut di Pemilihan Kepala daerah seharusnya diatur didalam Undang-Undang yang jelas merupakan tugas dan wewenangnya. Jadi tidak masuk ikut campur dalam peraturan KPU yang bersifat teknis tersebut, karena landasan diterbitkan Peraturan KPU pastilah berlandaskan pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

lolosnya Rusli Habibie dalam pencalonan kepala daerah akibat turut sertanya DPR dan Pemerintah dalam mengatur Peraturan KPU dan pedoman teknis pemilihan yang bersifat mengikat itu.

### **3. Pasal 4 ayat 1 huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah**

Peraturan KPU merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang. Sehingga aturannya harus berdasarkan Undang-Undang dan tidak boleh bertentangan. Demikianlah asas hukum yang universal bahwa aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dibawah mengacu pada peraturan perundang-undangan diatasnya dan juga peraturan perundang-undangan yang secara hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur lebih lanjut ke peraturan yang lebih bersifat teknis.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencalonan pemilihan kepala daerah yang mengatur calon kepala daerah di dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (f) menegaskan bahwa:

**tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.**

Pasal *a quo* diatas menyatakan disatu hal tidak memperolehkan terpidana untuk menjadi calon kepala daerah dalam frasa “**tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah**

**memperoleh kekuatan hukum tetap”** namun dilain hal pula memperolehkan terpidana untuk ikut dalam pencalonan melalui frasa **“terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara”**. Karena dalam Pasal *a quo* berdiri sendiri dan bukan alternatif seperti halnya Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik bahwa Pasal 4 ayat 1 huruf (f) adalah catat hukum yang bertentangan satu dengan lainnya. Sehingga menurut penyusun, Rusli Habibie yang diloloskan berdasarkan Pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan bersifat multitafsir.

#### **4. Solusi dari pertentangan peraturan perundang-undangan dalam hal syarat calon kepala daerah yang berstatus terpidana dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017**

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak bisa dihindari adanya pertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain atau adanya Peraturan Lembaga Negara yang bertentangan dengan Undang-Undang dan lainnya. Apapun alasannya, baik itu akibat dari kepentingan politik atau salah menafsirkan Undang-Undang tetap ada mekanismenya untuk menguji peraturan perundangan-undangan tersebut. Misalnya ketika Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka secara hukum dapat

diuji di Mahkamah Konstitusi sedangkan untuk peraturan perundang-undangan yang secara hierarki perundang-undangan di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan lainnya dapat diuji secara hukum pula di Mahkamah Agung<sup>52</sup>.

Untuk hal syarat calon kepala daerah yang berstatus terpidana yang ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2017 ini, terdapat pertentangan peraturan perundangan-undangan. Pertentangan itu terjadi di Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 4 ayat 1 huruf (f) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.

Sehingga langkah yang seharusnya dilakukan oleh KPU adalah menyampingkan Pasal 4 ayat 1 huruf (f) PKPU Nomor 9 tahun 2016 tersebut dalam penetapan pencalonan Rusli Habibie sebagai terpidana percobaan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 ini. Karena dasar hukum yang dipegang KPU adalah Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang secara hierarki perundang-undangan lebih tinggi daripada peraturan KPU. Kalaupun misalnya, KPU beralasan adanya Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur peran DPR dan Pemerintah yang turut serta dalam pembuatan Peraturan KPU dan pedoman teknis pemilihan dalam forum rapat dengar pendapat yang bersifat mengikat untuk meloloskan calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan. Disinilah celah hukum yang dijadikan dasar

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 24C ayat 1 dan 24A ayat 1 UUD NRI 1945

meloloskan calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan yang tidak berdasarkan Pasal yang mengatur syarat-syarat calon kepala daerah dalam Undang-Undang. Karena aturan yang lebih rendah yakni Peraturan KPU dalam mengatur persyaratan pencalonan harus berdasarkan aturan hukum yang lebih tinggi yakni Undang-Undang yang juga mengatur persyaratan pencalonan.

Oleh karena itu, tanpa perlu menunggu hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal ini, KPU seharusnya tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai pada tahap pencalonan kepala daerah itu selesai. Bahwa yang hanya dapat memenuhi syarat calon kepala daerah hanya untuk status mantan terpidana bukan yang masih berstatus terpidana.

#### ***B. Hak Politik Rusli Habibie Sebagai Calon Kepala Daerah Berstatus Terpidana Percobaan***

Dalam UUD NRI 1945 yang menjadi titik sentral pengakuan kedaulatan rakyat berada di awal Pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”. Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>53</sup>, pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya adalah rakyat dalam Negara Indonesia. Dengan demikian, untuk menjalankan kedaulatan rakyat harus dilembagakan oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan.

---

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 58.

Sehingga prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan prinsip kedaulatan hukum (*nomocratie*) harus berjalan beriringan sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan<sup>54</sup>.

Demi berjalannya sebuah pemerintahan, yang akan diisi oleh orang-orang yang diyakini mampu menjalankan pemerintahan berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya. Seperti yang dikemukakan didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di huruf (f) tentang penyempurnaan persyaratan calon dilakukan yang bertujuan agar tercipta kualitas kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas. Sehingga dalam membentuk mekanisme pengisian jabatan harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dalam hal ini kepala daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks hak politik calon kepala daerah khususnya dalam pemerintahan, setiap orang mempunyai hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) yang biasanya disebut juga sebagai hak pilih aktif untuk memilih dan hak pilih pasif untuk seseorang yang akan dipilih. Namun ketika berbicara hak politik tidaklah tanpa batas, karena dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat tertentu seseorang agar dapat melaksanakan hak politiknya.

---

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. h. 58

Dalam membahas bagaimana hak politik terkait calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan akan diteliti dan melihat bagaimana posisi calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu melalui:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang PENGESAHAN *INTERNASIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (UU Pilkada)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. (PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Pilkada).
6. Putusan Mahkamah Konstitusi

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Landasan konstitusional untuk memilih kepala daerah secara demokratis termaktub didalam Pasal 18 ayat 4 (BAB VI) tentang Pemerintah Daerah. Yang merupakan bagian dari hak bagi setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya<sup>55</sup>. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 tersebut, sudah terang karena merupakan suatu pelaksanaan prinsip demokrasi tanpa diskriminasi diantara sesama warga Negara<sup>56</sup>. Kemudian, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan secara eksplisit terdapat di Pasal 28D ayat 3 yang merupakan bagian Pasal Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945.

Dalam norma UUD NRI 1945 diatas, mengakomodasi setiap warga Negara untuk terlibat dan aktif dalam pemerintahan. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk ikut terlibat dalam pemerintahan juga ada pembatasannya. Lebih lanjut kita akan merujuk pada Pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan **Undang-Undang** dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

---

<sup>55</sup> Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*. (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1989), h. 169.



Jika dikaitkan dengan Rusli Habibie sebagai calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan, maka untuk membatasi calon kepala daerah yang terpidana percobaan harus berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap, misalnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang atau membatasi calon terpidana percobaan karena masih bersatus terpidana. Sehingga pengadilan menafsirkan bahwa yang hanya bisa memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah untuk calon yang pernah terjerat hukum, adalah hanya calon yang berstatus mantan terpidana. Walaupun sesungguhnya status terpidana percobaan untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah sudah terjawab didalam Pasal 28J ayat 2 diatas, yang menegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sehingga, didalam Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur pembatasan tersebut, dengan mengatakan bahwa calon kepala daerah “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

## **2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Ketika melihat Undang-Undang HAM ini, yang disahkan pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta oleh Presiden Indonesia ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie, pasti tidak lepas dari sejarah Negara Indonesia sebelum reformasi. Yang, ketika dibawah kepemimpinan Orde Baru tidak

terlaksananya penegakan HAM secara sepenuhnya. Sehingga Undang-Undang HAM baru dilembagakan pasca reformasi. Namun bukan berarti bahwa sebelum orde baru tumbang (sebelum reformasi), tidak ada hak asasi yang diakui. Didalam hal ini terdapat pengakuan HAM di Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Walaupun Bagir Manan<sup>57</sup> mengemukakan, rata-rata pendapat dari ahli hukum maupun ahli politik dan para pengamat mengatakan bahwa salah satu kekurangan mendasar UUD 1945 sebelum perubahan yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu, tidak memuat secara lengkap terkait Hak Asasi Manusia.

Pada waktu merancang Undang-Undang Dasar 1945, maka yang kata pembukaannya saja yang menjamin demokrasi tetapi pasal yang bersifat kemerdekaan diri atau individu tidak dimasukkan ke dalam UUD 1945 karena menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner, sehingga hak asasi manusia tidak diakui seluruhnya melainkan diambil satu, dua saja yang sesuai dengan kondisi politik dan sosial pada tahun 1945<sup>58</sup>. Adapun hak yang dijamin dalam UUD 1945 pada waktu itu, yaitu:

1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
2. Kemerdekaan pemikiran
3. Hak berkerja dan hidup
4. Kemerdekaan agama

---

<sup>57</sup> Bagir Manan, dkk., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia (Butir-butir Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. DR. H. RUKMANA AMANWINATA, S.H., M.H.)*. (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2009), h. 4.

<sup>58</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*. (Djakarta: Djambatan, 1951), h. 90.

Kemudian Muhammad Yamin<sup>59</sup>, menerangkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta kemerdekaan fikiran belumlah diatur dalam Undang-Undang dan Hak bekerja dan hidup serta kemerdekaan agama hanyalah jaminan yang tidak diatur lebih lanjut.

Untuk hak asasi manusia dalam pemerintahan menurut Undang-Undang HAM ini, diatur didalam Pasal 43 ayat 1, 2 dan 3 sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Aturan didalam Undang-Undang HAM ini, memberikan legitimasi kepada setiap warga Negara untuk turut serta dan dapat dipilih dan memilih dalam pemerintahan. Namun, tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk calon kepala daerah yang ingin turut serta dalam pemerintahan di daerah, harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum pemilihan kepala daerah. Itulah yang dimaksud Pasal 43 ayat 1 dan 2 diatas. Bukan, secara langsung diberikan oleh Undang-Undang HAM ini.

Sehingga bagi calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan, tetap mempunyai hak yang sama turut serta dalam pemerintahan. Namun

---

<sup>59</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*. h. 91.

tetap harus, mendapat legitimasi pencalonannya melalui Undang-Undang yang mengatur khusus tentang pemilihan kepala daerah.

### **3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang PENGESAHAN *INTERNASIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ini disahkan pada tanggal 28 Oktober 2005. Pertimbangan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Internasional ini, karena Indonesia menganggap dirinya sebagai Negara hukum yang sejak proklamasi menjunjung tinggi nilai-nilai HAM itu sendiri, dan juga dianggap tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga sesuai dengan sifat Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia<sup>60</sup>.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang kita singkat DUHAM), yang baru kemudian disahkan dalam sidangnya tanggal 16

---

<sup>60</sup> Lihat Penjelasan Umum & Konsiderans (menimbang) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

Desember 1966 dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976<sup>61</sup>.

Tujuan utama dari DUHAM ini, adalah untuk suatu standar universal tentang hak asasi manusia<sup>62</sup>. Philipus M. Hadjon<sup>63</sup>, kemudian mengemukakan sifat dari DUHAM tersebut nampak dari rumusannya, yaitu:

- a. Semua artikel dalam deklarasi tersebut senantiasa dimulai dengan kata-kata yang mengandung makna yang universal seperti : *everyone, no one, men, women*;
- b. Validitasnya tidak terbatas pada negara tertentu
- c. Deklarasi tersebut tidak hanya merupakan seruan kepada bangsa-bangsa tetapi kepada setiap individu dan setiap lembaga masyarakat;
- d. Organ PBB dalam mempertahankan hak-hak asasi manusia demi terciptanya perdamaian dan keamanan dunia tidak hanya terbatas pada negara-negara anggota PBB.

Diundangkannya hak-hak sipil dan politik tersebut memberi jaminan bagi setiap warga Negara sehingga tidak bisa diabaikan. Dalam kaitannya dengan hak setiap warga Negara mengenai hak politiknya, diatur didalam Pasal 25 Undang-Undang *a quo* yang dalam rumusannya mengatakan setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan. Lebih lanjut didalam Pasal 25 *a quo* membagi tiga poin sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik

<sup>62</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 56.

<sup>63</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. h. 56-57

- (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
- (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Melihat pengaturan diatas, bahwa hak untuk dipilih dalam pengisian jabatan pemerintahan telah terakomodir. Dalam hal ini yang berkaitan dengan Rusli Habibie sebagai calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan, tidak mempunyai hal yang berbeda dengan Undang-Undang dasar 1945 dan Undang-Undang HAM. Karena aturan tentang hak sipil dan politik bagi setiap warga Negara terjamin dalam ICCPR ini. Sehingga, tidak ada hal yang membatasi, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur syarat-syarat calon kepala daerah tersebut.

#### **4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

Undang-Undang *a quo*, merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 yang kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). Oleh karena itu, legitimasi Undang-Undang Pilkada yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jucto Undang-Undang

Nomor 8 tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Ketiga aturan hukum pemilihan kepala daerah tersebut itu menjadi landasan hukum untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara bertahap mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2024 untuk pemilihan serentak nasional<sup>64</sup>. Sehingga aturan yang hukum ini tetap merupakan satu kesatuan. Namun dengan adanya perubahan atas Undang-Undang sebelumnya sehingga yang digunakan yaitu Undang-Undang hasil perubahan. Dengan demikian, berlakunya asas hukum umum “*lex posterior derogat legi priori*”<sup>65</sup> yang berarti Undang-Undang yang lebih baru menyampingkan Undang-Undang yang lama.

Untuk syarat calon kepala daerah dalam Undang-Undang pemilihan Kepala Daerah ini telah terjadi banyak perubahan, baik setelah diuji materil (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi dan juga adanya perubahan yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang itu sendiri, dalam hal ini Pemerintah dan DPR. Sehingga syarat calon kepala daerah bagi calon yang telah terpidana (mantan terpidana) juga ditetapkan dalam syarat pencalonan.

Calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana harus mengumumkan kepala publik bahwa ia adalah seorang mantan terpidana, dengan alasan agar pemilih mengetahui rekam jejaknya. Adapun maksud

---

<sup>64</sup> Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

<sup>65</sup> Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 5.

kenapa seorang calon harus mengumumkan kepada publik bahwa dirinya seorang mantan terpidana, tidak lain adalah untuk agar pemilih dapat memilih calon kepala daerah yang berintegritas. Walaupun demikian, Negara tetap memberikan hak-hak sipil dan politik kepada seorang mantan terpidana. Kemudian alasan lain, bahwa seseorang yang telah menjalani pembinaan dalam Lembaga Perasyarakatan haruslah dianggap sebagai seorang yang seperti sediakala. Dalam artian harus diterima dan diberi kesempatan kembali dalam masyarakat. Disinilah peran Negara untuk membina seorang yang didalam permasyarakatan agar dapat kembali menjadi orang yang berguna untuk masyarakat dan Negaranya.

Ketika dikaitkan dengan kasus Rusli Habibie yang berstatus terpidana percobaan terkait hak pilihnya dalam pemerintahan. Telah diatur didalam Undang-Undang *a quo*, bahwa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana mengemukakan kepada publik bahwa ia adalah seorang mantan terpidana<sup>66</sup>. Jadi alasannya, seorang terpidana percobaan masih berstatus sebagai terpidana walaupun pidananya dijalani diluar Lembaga Perasyarakatan. Sehingga harus ditafsir bahwa status terpidana percobaan baru kemudian berubah sebagai mantan terpidana ketika habis tempoh masa pidana percobaannya. Dengan demikian barulah dia dapat memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah itu pun harus mengemukakan kepada publik bahwa ia adalah seorang mantan terpidana.

---

<sup>66</sup> Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016



**5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah**

Peraturan KPU adalah sebagai aturan teknis pelaksanaan dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga dalam ini, pengaturannya tidak bisa bertentangan dengan aturan umum yang mengatur tentang calon kepala daerah (Undang-Undang tentang Gubernur, Bupati dan Walikota). Dalam konsiderans (menimbang) huruf b dan dasar hukum (mengingat) nomor 7 Peraturan KPU ini, jelas mengatakan bahwa untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam hal lainnya, didalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 mengatur bahwa dalam menyusun dan menetapkan PKPU ini, harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam Forum Rapat Dengar Pendapat dan konsultasi tersebut bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut PKPU ini, dalam konsiderans (menimbang) mengatakan dihuruf c bahwa PKPU berdasarkan hasil konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam Forum Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dituangkan dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor PW/ 14951/ DPR RI/ IX/ 2016 tanggal 18 September 2016 dan Nomor PW/ 0125/ KOM.II/ IX/

2016 tanggal 9 September 2016. Sehingga lahirlah Peraturan KPU ini yang mengatur dapatnya seorang terpidana percobaan untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah<sup>67</sup>.

Jadi kalau DPR dan Pemerintah menganggap dasar pembetulan PKPU yang meloloskan calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan melalui Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menurut penulis merupakan penafsiran yang keliru karena Pasal *a quo* bukanlah pasal yang mengatur syarat calon kepala daerah secara langsung didalam Undang-Undang. Karena syarat calon kepala daerah diatur secara umum didalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dengan demikian, menurut hemat penulis hak dipilih (*right to be candidate*) dalam pemilihan kepala daerah untuk terpidana percobaan telah gugur dengan sendirinya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang mengatakan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Tidak pernah sebagai **terpidana** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi **mantan terpidana** telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan **mantan terpidana**.

Sehingga menurut penulis, Pasal 4 ayat 1 huruf (f) didalam PKPU yang meloloskan terpidana percobaan, bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Undang-Undang Nomor 10 tahun

---

<sup>67</sup> Pasal 4 ayat 1 huruf (f) PKPU Nmor 9 Tahun 2016

2016). Karena berdasarkan asas hukum umum, “*lex superior derogat legi inferiori*” yang berarti bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan hukum yang lebih rendah, apabila terjadi konflik<sup>68</sup>. Dengan demikian PKPU Nomor 9 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan kepala daerah.

## 6. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi lahir di era reformasi pada saat amandemen UUD yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan dirumuskan kedalam Undang-Undang Dasar hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 Nopember 2001 dan dimulai beroperasi pada tanggal 15 Oktober 2003<sup>69</sup>.

Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai pengawal konstitusi (UUD NRI 1945). Kewenangan atributifnya melalui UUD NRI 1945 terdapat didalam BAB XI tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 24C. Wewenang Mahkamah Konstitusi terdapat didalam Pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tertera sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, h. 8.

<sup>69</sup> Diakses melalui [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id).

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dengan demikian, apapun yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi semua orang (*erga omnes*) karena Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Artinya, tidak ada lagi upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali seperti di badan peradilan umum. Mahkamah Konstitusi, telah memutus berbagai Undang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Walaupun harus dipahami bahwa, produk hukum berupa Undang-Undang (dalam arti formal) yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR melalui mekanisme yang ketat sehingga secara formal sebuah Undang-Undang yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah merupakan produk final yang dipandang sebagai cerminan aspirasi dari masyarakat<sup>70</sup>. Namun demikian, Undang-Undang sering diwarnai kontroversi bahkan konflik yang baik ketika dibuat maupun dilaksanakan sehingga memicu penolakan oleh rakyat. Sehingga, jalan konstitusional untuk menolak atau tidak menyetujui Undang-Undang hanya dapat dilakukan melalui uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi.

Dalam pengujian Undang-Undang terkait pemilihan kepala daerah tahun 2015 lalu, untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasca

---

<sup>70</sup> Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 189.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, telah terjadi 25 kali pengujian terhadap UUD dan 7 dari pengujian (permohonan) tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi<sup>71</sup>. Banyaknya Permohonan tersebut terjadi sebelum terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah serentak tahap pertama pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu.

Sebelum pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2017 ini, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 juga terjadi permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi oleh Rusli Habibie (pertahana Gorontalo) yang berstatus sebagai terpidana percobaan. Bahwa Rusli Habibie menganggap adanya kerugian hak konstitusionalnya melalui hasil perubahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yaitu Undang-Undang 10 Tahun 2016. Namun putusan terkait terpidana percobaan ini, belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalaupun nanti diputus oleh Mahkamah Konstitusi untuk permohonan terpidana percobaan ini, putusannya tidak berlaku surut kebelakang (Asas Hukum Non-Retroaktif). Oleh karena bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat semua orang, jadi walaupun yang mengajukan permohonan oleh Rusli Habibie sebagai terpidana percobaan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 ini bukan semata-mata hanya untuk kepentingan pemohon, tetapi juga akan berakibat pada terpidana percobaan lain nantinya. Putusan

---

<sup>71</sup> Achmadudin Rajab, "Tinjauan Hukum Eksistensi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 46. No. 3 (Agustus 2016), h. 362. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/93> (Diakses 04 Februari 2017).

tersebut nantinya juga akan berlaku untuk terpidana percobaan lainnya yang mungkin saja akan ada di tahun pemilihan kepala daerah yang akan datang. Sehingga untuk kasus Rusli Habibie itu sendiri, harusnya ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus perihal permohonan terpidana percobaan ini sebelum terselenggaranya pemilihan kepala daerah tahun 2017, untuk dinyatakan mengabulkan atau tidak permohonan *a quo* sebagai jaminan adanya legitimasi dari pencalonan terpidana berstatus percobaan tersebut.

Mahkamah Kontitusi tahun 2015, pernah memutus tentang permasalahan syarat calon kepala daerah terkait mantan narapidana didalam Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 membatalkan Pasal 7 hurud (g) tersebut secara bersyarat bahwa dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Melihat putusan tersebut, secara jelas dan tegas mengemukakan bahwa hanya untuk mantan narapidana saja, yang telah secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana yang memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian dilanjutkan oleh DPR dan Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Pemilihan Kepala daerah yang berlaku untuk pemilihan kepala daerah sekarang.

### C. Analisis Kasus

Kasus Rusli Habibie<sup>72</sup> ini bermula pada tahun 2013, yang saat itu kedudukannya selaku Gubernur Gorontalo pernah mengeluarkan surat tanggal 17 Juni 2013, yang isinya adalah menyampaikan laporan tentang situasi keamanan di wilayahnya, termasuk menyampaikan adanya kendala disharmoni hubungan dengan Pimpinan Polda Gorontalo saat itu. Surat tersebut ditunjukkan kepada Menko Polhukam, kemudian juga tembusan kepada Presiden, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Panglima Tujuh Wirabuana, Ketua Komisi III, dan Plt. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini dilakukan dalam kedudukannya selaku Gubernur yaitu Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Namun, akibat dari pengiriman surat tersebut ternyata di kemudian hari dibawa ke ranah pidana dengan sangkaan melanggar Pasal 317 ayat 1 KUHP yang dalam Pasal tersebut mengatur tentang pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa.

Sehingga Rusli Habibie, didakwakan melanggar Pasal 317 ayat 1 KUHP dan kemudian terpidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 348/K/PID/2016 yang dihukum satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Status Rusli Habibie selaku terpidana percobaan akibat pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa

---

<sup>72</sup> Disampaikan oleh Kuasa Hukum Rusli Habibie (Heru Widodo) di Mahkamah Konstitusi dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 perihal pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 (Acara Pemeriksaan Pendahuluan I), h. 2-3. (Diakses melalui website resmi Mahkamah Konstitusi [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id))

tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik seseorang diserang atau karena melakukan fitnah seperti yang termaktub didalam Pasal 317 ayat 1 KUHP.

Oleh karena status terpidana percobaan Rusli Habibie tersebut, dihalangi hak politiknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, peraturan KPU justru menyelamatkan Rusli Habibie untuk dinyatakan memenuhi syarat calon kepala daerah berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf (f) yang mengatakan bahwa “terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak dalam penjara”.

Atas kasus tersebut, seharusnya Komisi Pemilihan Umum tetap berpegang pada Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam memverifikasi lolos atau tidaknya seseorang menjadi calon kepala daerah. Karena pada dasarnya tujuan dari pemilihan kepala daerah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari kasus hukum juga pemerintahan yang dapat mensejahterahkan rakyatnya. Sehingga mekanisme pemilihan kepala daerah hanya bagian terkecil dari perwujudan hak asasi manusia. Karena ada hak yang lebih fundamental dalam kehidupan untuk masyarakat yaitu hak untuk mendapatkan pangan, sandang dan papan yang lebih baik. Dengan demikian, hubungannya dengan calon pemangku jabatan tersebut, haruslah orang-orang yang



berintegritas dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah rakyat tersebut. Agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh rakyat seperti kasus korupsi pejabat daerah, terjeratnya kasus hukum pejabat daerah sehingga terjadi kevakuman pelayanan pemerintahan untuk sementara waktu. Semua itu dapat berdampak bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Disisi lain, KPU sebagai penyelenggara negara harus berpegang teguh pada prinsip Negara Hukum yang termaktub didalam UUD NRI 1945. Bahwa Negara Indonesia berdasarkan Hukum dan juga menjamin kedaulatan rakyat. Sehingga harus sadar betul dalam menjalankan fungsi dan tugasnya agar dapat menjalankan amanah UUD NRI 1945 bahwa KPU adalah Lembaga Negara yang independen. Di lain hal, adanya turut serta DPR dan Pemerintah dalam pembuatan Peraturan KPU dan pedoman teknis pemilihan yang bersifat mengikat<sup>73</sup>, ini membuat peran dan tugas masing-masing Lembaga Negara terkontaminasi dan tidak berjalan dalam relnya masing-masing. Sehingga tidak heran pula, jika itu dimaksudkan sebagai kepentingan politik yang tidak berdasar.

Kalaupun misalnya DPR dan Pemerintah menginginkan calon terpidana dalam hal ini terpidana percobaan yang vonis hukumannya tergolong ringan untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah, seharusnya diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

---

<sup>73</sup> Lihat Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLNRI Nomor 5898).

sehingga tidak terjadi disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, kedepan harus diatur syarat calon kepala daerah bagi seseorang yang pernah terjerat hukum. Harusnya tidak semua jenis hukuman seperti yang tertera dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (g), tidak memenuhi syarat selaku calon kepala daerah. Hanya untuk tindak pidana yang berat yang tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan jenis tindak pidana berat lainnya. Tapi untuk seseorang calon kepala daerah yang divonis hukuman tindak pidana ringan didalam penjara, harus selesai menjalani masa pidananya barulah kemudian dapat menjadi calon kepala daerah. Tidak perlu lagi mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana untuk menjadi calon kepala daerah. Karena berdasarkan realita yang terjadi, mengemukakan kepada publik tidak pernah terdengar diberitakan bahwa mantan terpidana mengemukakan kepada publik, sebelum mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Sehingga hal tersebut tidak efektif sama sekali.

Khusus untuk seseorang calon kepala daerah yang menjalani hukuman diluar penjara, maka harus bisa dipastikan tidak mengulangi perbuatannya kembali karena akan berakibat hukum jika hakim mencabut masa percobaannya dan dipidana didalam penjara. Sehingga konsekuensinya calon terpidana percobaan tersebut apabila terpilih jadi kepala daerah akan langsung diberhentikan tetap menjadi kepala daerah apabila mengulangi perbuatannya semula.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini, diuraikan berdasarkan pada hasil pembahasan dan rumusan masalah yang diajukan. Maka dalam melihat ketentuan syarat calon kepala daerah dan hak politik calon kepala daerah yang berstatus terpidana sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum syarat calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan dalam peraturan perundang-undangan bertentangan satu dengan lainnya. Undang-Undang menyatakan tidak memenuhi syarat calon yang berstatus terpidana sedangkan Peraturan KPU menyatakan memenuhi syarat pencalonan bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara.
2. Hak politik calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan dibatasi menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Sementara Undang-Undang HAM dan Undang-Undang ICCPR hanya mengatur hak politik secara umum. Namun didalam Peraturan KPU mengatur hak untuk dipilih (*right to be candidate*) Rusli Habibie sebagai terpidana percobaan dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penyusun terkait dengan status terpidana dan mantan narapidana yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah, sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam mengatur ketentuan syarat calon kepala daerah didalam peraturan perundang-undangan, adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara Undang-Undang, PKPU dan peraturan lainnya yang mengatur syarat calon kepala daerah ini.
2. Untuk calon kepala daerah yang pernah melanggar hukum, harus dibedakan jenis hukumannya. Sehingga untuk terpidana yang dipidana dengan pidana ringan, harus selesai menjalani masa pidananya kemudian dapat mengikuti pencalonan kepala daerah tanpa perlu mengemukakan lagi kepada publik bahwa ia merupakan mantan terpidana. Untuk jenis kejahatan yang berat, misalnya korupsi, terorisme, dan jenis kejahatan lainnya harus mengemukakan kepada publik bahwa dirinya pernah melakukan kejahatan. Tetapi harus diatur didalam Undang-Undang hanya dapat menjadi calon wakil kepala daerah dulu untuk masa satu kali masa jabatan pemerintahan (5 tahun) sebelum menjadi calon kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta Barat: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- , *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Aswanto. *Hukum dan Kekuasaan (Relasi Hukum, Politik dan Pemilu)*. Yogyakarta: Rangkang education, 2012.
- Budiardjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 1986.
- Duverger, Maurice. *Les Regimes Politiques*. Terj. Suwirjadi, *Teori Dan Praktek Tatanegara*. Djakarta: Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakyat N.V, 1951.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Ilyas, Amir dan Muhammad Nursal. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Jumadi, *Refleksi Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law And State*. Terj. Somardi, *Teori Umum Hukum Dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- , *Pure Theory of Law*. Terj. Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Hukum Normatif)*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Selatan: Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, 1981.

Manan, Bagir. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum: Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. DR. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.

Manan Bagir, dkk. *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia (Butir-butir Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. DR. H. RUKMANA AMANWINATA, S.H., M.H.)*. Bandung: PSKN FH UNPAD, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Natsif, Fadli Andi. *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1989.

Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1979.

Sukriono, Didik. *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Press, 2013.

Wahidin, Samsul. *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Widodo, Heru. *Hukum Acara Perselisihan Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

Wolhoff, G. J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Djakarta: Timun Mas, 1955.

Yamin, Muhammad. *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*. Djakarta: Djambatan, 1951.

### **Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLNRI Nomor 5898)*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 57, TLNRI Nomor 5678)*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656)*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permayarakatan (LNRI Tahun 1995 Nomor 77, TLNRI Nomor 3614)*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI 3886)*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (LNRI Tahun 2005 Nomor 119, TLNRI Nomor 4558)*

Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373)*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015

### **Skripsi & Jurnal:**

Putra, Gugum Ridho. "Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah". *Skripsi*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Quraissy, Ahmad. "Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.

Rajab, Achmadudin. "Tinjauan Hukum Eksistensi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 46. No. 3 (Agustus 2016). <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/93> (Diakses 04 Februari 2017).



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rabu, 08 Maret 2017

English

Search...

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



## LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

MENU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
BERANDA > INFORMASI PERSIDANGAN > RISALAH SIDANG

### RISALAH SIDANG

Nomor Perkara  Cari

05  
Dec  
2016

Nomor Perkara :  
71/PUU-XIV/2016  
Pokok Perkara :  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10



Nomor Perkara		71/PUU-XIV/2016	Cari
05 Dec 2016	11:12 WIB	Nomor Perkara : 71/PUU-XIV/2016 Pokok Perkara : PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDAN TENTANG PENETAPAN PERATURAN PE UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 20 GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEG/ TAHUN 1945 Acara Sidang : MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK T Di Unduh : 134 File Pendukung : <a href="#">Klik Disini</a>	
24 Nov 2016	11:20 WIB	Nomor Perkara : 71/PUU-XIV/2016 Pokok Perkara : PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDAN TENTANG PENETAPAN PERATURAN PE UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 20 GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEG/ TAHUN 1945 Acara Sidang : MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK T Di Unduh : 157 File Pendukung : <a href="#">Klik Disini</a>	
15 Nov 2016	11:12 WIB	Nomor Perkara : 71/PUU-XIV/2016 Pokok Perkara : PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDAN TENTANG PENETAPAN PERATURAN PE UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 20 GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEG/ TAHUN 1945 Acara Sidang : MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOH Di Unduh : 135 File Pendukung : <a href="#">Klik Disini</a>	
02 Nov 2016	11:55 WIB	Nomor Perkara : 71/PUU-XIV/2016 Pokok Perkara : Pengujian UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perut Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peneta Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undar huruf g] Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Di Unduh : 128 File Pendukung : <a href="#">Klik Disini</a>	
25 Oct 2016		Nomor Perkara : 71/PUU-XIV/2016 Pokok Perkara : PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDAN TENTANG PENETAPAN PERATURAN PE UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 20 GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEG/ TAHUN 1945 Acara Sidang : MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK T Di Unduh : 134 File Pendukung : <a href="#">Klik Disini</a>	

**13  
Oct  
2016**  
14:12  
WIB

Nomor Perkara  
71/PUU-XIV/2016  
Pokok Perkara  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDAN  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PE  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 20  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEG/TAHUN 1945  
Acara Sidang  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DA  
DI Unduh  
121  
File Pendukung  
[Klik Disini](#)

**28  
Sep  
2016**  
14:31  
WIB

Nomor Perkara  
71/PUU-XIV/2016  
Pokok Perkara  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDAN  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PE  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 20  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEG/TAHUN 1945  
Acara Sidang  
PERBAIKAN PERMOHONAN (II)  
DI Unduh  
117  
File Pendukung  
[Klik Disini](#)

**14  
Sep  
2016**  
15:02  
WIB

Nomor Perkara  
71/PUU-XIV/2016  
Pokok Perkara  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDAN  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PE  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 20  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEG/TAHUN 1945  
Acara Sidang  
Pemeriksaan Pendahuluan (I)  
DI Unduh  
111  
File Pendukung  
[Klik Disini](#)

**2352-9000**

**ALAMAT KANTOR**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177  
[humas@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:humas@mahkamahkonstitusi.go.id)

**KUNJUNGI MK**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mohd Hazrul Bin Sirajuddin, dilahirkan di Tawau, Sabah (Malaysia), 28 Juni 1994. Anak pertama dari tiga bersaudara ini merupakan buah hati pasangan Andi Sirajuddin dan HJ. Itari. Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Kebangsaan Pasir Putih Tawau (Sabah) dan tamat tahun 2006, penyusun melanjutkan pendidikannya ke KBSR Perdana Tawau hanya sampai kelas 2 SMP dan menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Kahu (Bone) yang dinyatakan lulus pada tahun 2009. Penyusun kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kahu (Bone) dan dinyatakan lulus pada tahun 2012. Setelah pendidikan SMA selesai, pada tahun yang sama penyusun melanjutkan kuliah Strata satu (S1) di UIN Alauddin Makassar dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Jurusan Ilmu Hukum.

Riwayat pekerjaan selama menjadi mahasiswa pernah bekerja sebagai penjual angkringan makanan, driver laundry dan karyawan warkop dan counter pulsa sampai sekarang. Pengalaman organisasi, pernah bergabung di IPPS (Ikatan Penggiat Peradilan Semu), PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Cabang Makassar serta pernah menjadi anggota MARS (Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan).

Muda-mudahan karya perdana saya melalui “Skripsi” ini dapat berlanjut dan melahirkan karya lainnya di bidang akademik. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjalin komunikasi bisa dihubungi melalui Nomor Hp/WA: 0853-524-44251, Email: [mhazrulhukum@gmail.com](mailto:mhazrulhukum@gmail.com), FaceBook: Mohammad Hazrul dan Twitter: @m\_hazrul.